BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Non Performing Financing* (NPF atau Pembiayaan Bermasalah)

1. Pengertian *Non Performing Financing*

Non Performing Financing atau biasa disingkat NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.[21] Istilah lain *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.[22] Hal itu menunjukkan bahwa semakin besar NPF suatu bank syariah maka semakin besar pembiayaan yang bermasalah sehingga mengakibatkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba atau keuntungan semakin kecil.[23]

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang berpotensi tidak mampu mengembalikan pembiayaan (secara tiba-tiba tanpa menunjukan tanda-tanda terlebih dahulu) berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama. Besarnya *Non Performing*

---

[21] Muhammad Nugraha Reza Pradana, "Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Syariah". *Jurnal EKSIS*: Vol. 13 No. 2, 2018, hal. 131.

[22] Faturrahman Jamil, "*Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah"*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66.

[23] Muhammad Nugraha Reza Pradana, "Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal…..., hal. 131.

Financing yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penelitian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh.[24]

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	NPF < 2%	Sangat Baik
2	2% ≤ NPF ≤ 5%	Baik
3	5% ≤ NPF ≤ 8%	Cukup Baik
4	8% ≤ NPF ≤ 12%	Kurang Baik
5	NPF ≥ 12%	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat melalui rasio keuangannya sebagai indikator kesehatan serta sebagai alat analisis untuk memprediksi keuntungan yang akan dihasilkan. Penyebab dari pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan dari sisi internal maupun sisi eksternal.[25]

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor

[24] Slamet Riyadi, "*Banking Asset and Liability Management*", (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. 160-161.

[25] Mia Maraya Auliani, Syaichu, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014". *Journal Of Economics*: Vol. 05 No. 03, 2016, hal. 2

manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa yaitu:

a) lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan,
b) lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran,
c) kebijakan piutang yang kurang tepat,
d) penempatan berlebihan pada aktiva tetap,
e) permodalan yang tidak cukup.[26]

Secara dimensi internal, *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah dapat dianalisis dengan pencapaian yang telah diraih dengan melihat rasio keuangan berdasarkan laporan keuangannya. Laporan keuangan dapat mencerminkan keadaan keuangan perusahaan perbankan pada saat pelaporan keuangan. Laporan keuangan juga dapat memprediksi keadaan perusahaan perbankan di masa mendatang. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank Sentral bagi semua bank.[27]

b. Faktor Eksternal

Pengaruh eksternal meliputi faktor makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro

[26] Faturrahman Jamil, "*Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah,*…… hal. 73

[27] Mia Maraya Auliani, Syaichu, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal….., hal. 2

oleh pemerintah negara. Faktor eksternal yang terdiri atas variabel makroekonomi ternyata memberikan efek yang serius terhadap kinerja suatu perbankan, tak terkecuali perbankan syariah. Secara teoritis bank syariah tidak mengenal sistem bunga, sehingga profit yang didapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri. Inflasi dan nilai tukar diduga memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). [28] Faktor-faktor yang berada di luar kuasa manajemen perusahaan seperti:[29]

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
    1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
    2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan meniiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
    3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata

[28] Ibid,.
[29] Ismail, ”*Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 126

dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

b) Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

1. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
2. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

3. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Penggolongan ini didasarkan pada kemampuan membayar nasabah terhadap angsuran, antara lain:

1) Lancar yakni dikatakan demikian apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2) Dalam perhatian khusus yakni apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari.
3) Kurang lancar yakni jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).

4) Diragukan yakni jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari (9 bulan).

5) Macet yakni apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.[30]

Penggolongan pembiayaan bermasalah seperti yang dikemukakan diatas dapat membuat bank lebih cekatan dalam pengambilan keputusan, agar bank setidaknya terselamatkan dari pembiayaan bermasalah.

4. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas pembiayaan yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko pembiayaan bermasalah juga mungkin bisa terjadi. Tidak ada satu pun bank di dunia ini yang tidak memiliki pembiayaan bermasalah, karena tidak mungkin dari semua pembiayaan yang disalurkan semuanya lancar.[31] Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan (kredit) disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

[30] Faturrahman Jamil, "*Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah,*…… hal. 69-71
[31] Ismail, "*Manajemen Perbankan : Dari Teori……,* hal. 127.

1) Dari pihak perbankan yang artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan (kredit) dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.
2) Dari pihak nasabah yakni ketika kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidak sengajaan. Adanya unsur kesengajaan dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet dan dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.[32]

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah antara lain:[33]

1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.
2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah.

[32] Kasmir, "*Dasar-dasar Perbankan"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 128-130.

[33] Ismail, "*Manajemen Perbankan : Dari Teori……,* hal. 127.

Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

3) Penataan kembali (*Restructuring*) merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.

4) Kombinasi merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara mengkombinasikan antara lain:

   a) *Rescheduling* dan *Restructuring* misalnya, bank memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan menambah jumlah pembiayaan.

   b) *Rescheduling* dan *Reconditioning* misalnya, bank memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga.

   c) *Restructuring* dan *Reconditioning* misalnya, penambahan pembiayaan diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga agar dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

   d) *Rescheduling, Restructuring,* dan *Reconditioning*. Upaya gabungan ketiga cara ini merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya, jangka waktu diperpanjang, pembiayaan ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

5) Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah.

B. *Financing to Deposit Ratio* (FDR atau Rasio Pembiayaan)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

1. Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio merupakan ratio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.[34] Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai berikut:

1) KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) (jika ada)
2) Giro, deposito, dan tabungan masyarakat.
3) Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak termasuk pinjaman subordinasi.
4) Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
5) Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari bulan.
6) Modal pinjaman.
7) Modal inti.

Financing to Deposit Ratio tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang

[34] Lukman Dendawijaya, "*Manajemen Perbankan"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 59

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.[35] Rumus untuk menghitung *Financing to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut :[36]

$$\textbf{\textit{Financing to Deposit Ratio}} = \frac{\textbf{Total Pembiayaan}}{\textbf{Total DPK}} \times \textbf{100 \%}$$

Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* tidak boleh melebihi 110%.[37] Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.

Financing to Deposit Ratio dapat pula digunakan untuk menilai strategi suatu bank. Manajemen bank konservatif biasanya cenderung memiliki nilai yang relatif rendah. Sebaliknya bila *Financing to Deposit Ratio* melebihi batas toleransi dapat dikatakan manajemen bank yang bersangkutan sangat ekspansif atau agresif.[38]

---

[35] Lukman Dendawijaya, "*Manajemen Perbankan"*,…… hal. 116.

[36] Dwi Suwiknyo, "*Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 148.

[37] Veithzal Rivai dkk, "*Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep*…....., hal. 784-785.

[38] Muhammad, "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*", (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 75.

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

Setiap proses penyaluran dana harus mengacu pada pedoman yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan umum penyaluran dana bank. Penerapan prinsip kehati-hatian pada dasarnya mengurangi risiko penyaluran dana yang berakibat pada penurunan tingkat keuntungan bank. Kebijakan pokok dalam penyaluran dana meliputi:

1) Penerapan prinsip kehati-hatian melalui prosedur penyaluran dana yang sehat, penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap *plafondering*, prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah.
2) Kebijakan penyaluran dana pihak terkait.
3) Pemetaan sektor ekonomi dan segmen pasar.
4) Penyaluran dana yang perlu dihindari meliputi penyaluran dana yang bertentangan dengan syariah, untuk tujuan spekulasi, kepada nasabah yang bermasalah dan lainnya yang dapat merugikan bank nantinya.[39]

C. Giro Wajib Minimum (GWM atau *Reserve Requirement*)

Dalam melakukan pengaturan likuiditas perbankan, salah satu piranti moneter yang dapat digunakan adalah melalui penetapan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM atau *Reserve Requirement*).

[39] Muhammad, "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank*……..., hal. 95-101.

1. **Pengertian Giro Wajib Minimum (GWM atau *Reserve Requirement*)**

Reserve Requirement atau lebih dikenal dengan Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank Indonesia bagi semua bank.[40] Dalam pengertian lain, GWM merupakan rasio antara saldo giro dari seluruh kantor bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dengan rata-rata harian jumlah Dana Piha Ketiga (DPK) bank.[41]

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/17/13PPP tanggal 28 Februari 1992, besarnya *Reserve Requirement* (RR) adalah 2 %. Terhitung sejak tanggal Februari 1996, besarnya *Reserve Requirement* (RR) adalah 3 % dan sejak tahun 1997 menjadi 5 %.[42] Untuk mengetahui besarnya *Reserve Requirement* (RR) dapat menggunakan perbandingan berikut :

$$\textbf{Giro Wajib Minimum (GWM)} = \frac{\textbf{Giro pada BI}}{\textbf{Total DPK}} \textbf{ X 100 \%}$$

Reserve Requirement merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Besarnya RR tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan sejak tahun 1997 hingga

[40] Lukman Dendawijaya, "*Manajemen Perbankan"*,…… hal. 115.
[41] Zainul Arifin, "*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*", (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), hal. 183.
[42] Lukman Dendawijaya, "*Manajemen Perbankan"*,…… hal. 115.

sekarang besarnya RR adalah 5 %.[43] Aturan tentang GWM ini bisa jadi sebuah tekanan bagi perbankan karena aturan ini menyebabkan perbankan harus menyimpan dananya dalam bentuk Saldo Giro di BI sehingga menjadi adanya aktiva yang tidak menghasilkan (karena dana diperuntukkan ke GWM) sehingga dari dana yang tidak produktif ini menimbulkan *cost of fund* yang tentu saja mengurangi pendapatan bank syari'ah.[44]

Kewajiban pemeliharaan GWM dimaksudkan agar semua kewajiban likuiditas bank dapat segera terpenuhi, untuk menghadapi penarikan melalui kliring, penarikan melalui nasabah pembiayaan, penarikan tunai nasabah dan kewajiban bank lainnya baik untuk kepentingan internal bank maupun untuk kepentingan eksternal bank. Penyediaan GWM ini menjadi begitu penting, sebab bilamana suatu ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban segera, sudah dapat dipastikan bank akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, yang akhirnya akan mengganngu hubungan bisnis antara bank dengan masyarakat.

Pemenuhan Giro wajib Minimum (GWM) atau *reserve requirement* atau disebut *statutory reserve* sejak 2004 mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia

[43] Ibid., hal. 115.

[44] Muhammad Nugraha Reza Pradana, "Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal……, hal. 132

No.7/49/PBI/2005. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia mengganti aturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam valuta rupiah dan valuta asing. Namun tidak berselang lama, Bank Indonesia juga menerbitkan perubahan PBI No. 10/19/PBI/2008 melalui PBI No. 10/25/PBI/2008. Oleh karena itu dalam menentukan Giro Wajib Minimum di Indonesia tidak lepas dari PBI tahun 2008 yang berlaku saat ini, yaitu presentase GWM di Bank Indonesia dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah, sedangkan GWM dalam valuta asing adalah 3% dari DPK dalam valuta asing.[45]

Giro Wajib Minimum (GWM) terdiri dari GWM rupiah dan GWM valuta asing, yaitu sebagai brikut :

1) Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah
   a) GWM Primer adalah simpanan minimun yang wajib dipelihara oleh bank dalam saldo rekening giro IB yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertenti dari dana pihak ketiga (DPK), yaitu sebesar 5% dari DPK dalam rupiah.
   b) GWM Sekunder adalah cadangan minimun yang wajib dipelihara oleh bank berupa SBI (Sertifikat Bank Indonesia), SUN (Surat Utang Negara), SBSN (Surat Berharga Syariah

[45] Rachmadi Usman, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*", (Jakarta : Sinar, Grafika, 2012), hal. 174.

Negara/Sukuk Negara), dan/atau *excess reserve* yang besarnya 2,5% dari DPK dalam rupiah.

c) GWM *Loan to Deposit Ratio* (GWM LDR) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro BI sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh bank dan LDR target.

2) Giro Wajib Minimum dalam Valuta Asing

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing, yang dalam hal ini ketentuan pemenuhannya adalah sebagai berikut:

a) Per tanggal 1 maret s/d 31 mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam valuta asing.

b) Sejak tanggal 1 juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing di giro BI.

BI menaikkan kewajiban GWM valuta asing perbankan dengan alasan untuk memperkuat likuiditas valuta asing perbankan dan memitigasi risiko pembalikan arus modal asing dalam jumlah besar yang terjadi secara mendadak. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam rupiah dengan menggunakan kurs dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam rupiah dengan

menggunakan kurs tengah BI pada hari terjadinya pelanggaran tersebut.[46]

Bank umum wajib memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah, sedangkan bank devisa selain wajib memenuhi ketentuan GWM dalam rupiah juga wajub memenuhi GWM dalam valuta asing. Masing-masing besaran GWM di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi makro ekonomi di Indonesia. Dalam kebijakan ekonomi yang bersifat kontraksi (mengurangi jumlah uang beredar), maka otoritas moneter akan menaikkan GWM.[47]

D. Nilai Tukar (Kurs)

Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda dan juga memiliki nilai. Dengan memiliki nilai, maka dapat diukur perbandingan mata uang dari tiap-tiap negara tersebut.

1. Pengertian Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang dometik. Kurs didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai kurs akan berbeda dengan mata uang suatu Negara.[48] Nilai tukar (kurs)

---

[46] Heri, "*Analisis Laporan Keuangan*", (Yogyakarta : CAPS, 2015), hal. 230.
[47] Solikin Warjiyo, "*Kebijakan Moneter di Indonesia*". (Jakarta: PPSK BI, 2003), hal. 22
[48] Asfia Murni, "*Ekonomi Makro: Edisi Revisi*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal. 244

menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain.[49]

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar (Kurs)

Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta, yang selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:[50]

1) Perubahan citarasa masyarakat

Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan citarasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran akan valuta asing.

2) Perubahan harga barang ekspor dan impor

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang

[49] Sadono Sukirno, "*Makro Ekonomi: Teori Pengantar*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 397.

[50] N. Gregory Mankiw, "*Makroekonomi Edisi Enam (ed. Wibi Hardani, dkk.)*", (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 402- 403.

relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka ekspornya akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor, dan sebaliknya, kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor. Dengan demikian perubahan harga-harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan atas mata uang negara tersebut.

3) Kenaikan harga umum (inflasi)

Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kurs valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai valuta asing. Kecenderungan tersebut disebabkan efek inflasi yang menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri dan karena itu inflasi akan menambah impor yang menyebabkan permintaan atas valas bertambah. Selain itu inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, karena itu inflasi cenderung mengurangi ekspor yang menyebabkan penawaran atas valas berkurang. Maka harga valas akan bertambah (berarti harga mata uang negara yang mengalami inflasi merosot).

4) Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri.

Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke negara tersebut. apabila lebih banyak modal mengalir ke suatu negara, permintaan atas mata uangnya bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara yang dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di negara-negara lain.

5) Pertumbuhan ekonomi

Efek yang diakibatkan oleh kemajuan ekonomi terhadap nilai mata uangnya tergantung pada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan tersebut diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya dan akan menaikkan nilai mata uangnya. Tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya dan akan menurunkan nilai mata uang negara tersebut.

3. Sistem Nilai Tukar (Kurs)

Secara garis besar ada dua macam sistem kurs yaitu system kurs mengambang (*floating exchange rate system*) dan sistem kurs tetap (*fixed exchange rate system*) diatara kedua macam sistem tersebut ada beberapa

variasinya. Sistem kurs mengambang sering juga disebut dengan *freely fluctuating exchange rate system* atau sistem kurs bebas dan *flexible exchange rate system* namun yang paling populer yaitu istilah *floating exchange rate system.*

Sistem kurs mengambang terkandung dua variasi. Pertama, *dirty float* yaitu apabila pemerintah secara aktif melakukan usaha stabilitasasi kurs valuta asing. Kedua, *clean float* yaitu jika pemerintah tidak melakukan usaha stabilitas kurs.[51] Suatu sistem dikatakan menerapkan sistem kurs bebas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Mata uang yang beredar tidak konvertibel terhadap emas.
2) Kurs valuta asing ditentukan sepenuhnya oleh pasar. Apabila pemerintah melakukan investasi maka yang dilakukan adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran valuta asing.
3) Tidak ada pembatasan penggunaan valuta asing.

E. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

1. Pengertian Inflasi

Laju inflasi merupakan fenomena ekonomi yang lazim terjadi pada suatu perekonomian. Inflasi akan menjadi suatu persoalan ekonomi yang

[51] Imamudin Yuliadi, "*Ekonomi Moneter*", (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hal. 60.

serius manakala berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan berada pada level yang tinggi. Secara teoritis inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus. Jadi kenaikan pada sekelompok kecil barang atau perubahan harga belum bisa dikatakan sebagai inflasi.

Pada perekonomian modern inflasi sangat bersifat inersial artinya bahwa gejala inflasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari gejala ekonomi. Gejala inflasi inersial bersifat tetap dan jangka panjang sehingga bisa diprediksikan. Namun inflasi inersial akan mengalami perubahan manakala timbul guncangan (*shock*) pada sisi permintaan agregat atau perubahan harga minyak dunia, pergeseran nilai tukar, kegagalan panen, dan sebagainya.[52]

Besarnya tingkat inflasi harus dikendalikan. Kondisi ini disebabkan tingginya inflasi akan membawa dampak negatif bagi kondisi social ekonomi masyarakat. Beberapa dampak negatif yang timbul dari tingginya inflasi sebagai berikut:

1) Tingkat pendapatan riil terus menurun sehingga standar hidup masyarakat menurun.
2) Menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan.
3) Laju inflasi dalam negeri yang lebih tinggi daripada inflasi di Negara lain menyebabkan tingkat bunga domestik riil tidak *kompetatif*.

[52] Ibid,. hal. 74.

Kondisi inflasi yang tinggi akan mengakibatkan risiko tinggi pula terhadap kredit/ pembiayaan yang diberikan. Meskipun nasabah telah melunasi kredit dan bunga, bila dibandingkan dengan daya beli rupiah menurun. Biasanya inflasi yang tinggi ditandai dengan tingkat suku bunga yang tinggi pula.[53] Berikut rumus inflasi adalah sebagai berikut :

$$\textbf{Inflasi} = \frac{\mathbf{IHK_t - IHK_{t-1}}}{\mathbf{IHK_{t-1}}} \times \mathbf{100\ \%}$$

2. Teori Inflasi

Paling tidak ada empat teori tentang inflasi yang menjadi patokan penyebab dan pemberian solusi ketika terjadi inflasi. Keempat teori tersebut diantaranya adalah teori kuantitas, teori keynes, teori strukturalis, dan mark up model.[54]

1) Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah pertama, bahwa inflasi itu hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang.

[53] Veithzal Rivai dkk,"*Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 275.

[54] Adiwarman A. Karim, "*Ekonomi Makro Islam*", (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2008), hal. 135.

2) Teori Keynes

Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes bahwa ini terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan agresif masyarakat.

3) Teori Strukturalis.

Teori ini biasa disebut dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor.

4) Mark-up Model

Dalam teori ini dasar pemikiranya ditentukan oleh dua komponen yakni *cost of production* dan *profit margin*. Jadi apabila ada kenaikan antara kedua komponen maka harga jual komoditi di pasar juga akan meningkat.

3. Faktor-Faktor Penyebab Inflasi

Laju inflasi dapat meningkat secara tiba-tiba karena peristiwa ekonomi tertentu. Secara umum, penyebab terjadinya inflasi sebagai berikut:[55]

1) Meningkatnya permintaan agregat (*demand aspect*)
2) Kesenjangan antara jumlah uang beredar dan jumlah barang dalam masyarakat.
3) Rendahnya produksi barang dan/atau jasa (*supply aspect*) sehingga pasokan barang terlambat.
4) Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL).
5) Jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah karena penerbitan uang baru oleh otoritas moneter.
6) Adanya desakan kelompok tertentu untuk memperoleh kredit dengan bunga ringan.
7) Fluktuasi sector luar negeri (ekspor/impor), investasi, tabungan, dan pendapatan Negara.

4. Pembagian Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahan

Tingkat keparahan inflasi berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhinya. Inflasi ditinjau dari tingkat keparahannya dapat dibagi menjadi empat yaitu:[56]

[55] Yan Hanif Jawangga, "*Seri Pengayaan Pembelajaran Ekonomi: ILMU EKONOMI MAKRO*", (Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media, 2018), hal. 37.

1) Inflasi Ringan, merupakan inflasi yang di bawah 10 % per tahun. Meskipun harga barang umum naik terus-menerus, inflasi ringan belum menimbulkan krisis ekonomi.
2) Inflasi Sedang, merupakan inflasi yang terjadi pada tingkat 10-30 % per tahun. Inflasi ini menyebabkan dampak bagi masyarakat berpenghasilan tetap.
3) Inflasi Berat, merupakan inflasi yang terjadi pada tingkat 30-100 % per tahun. Pada inflasi ini, masyarakat bisa memilih menyimpan uang dan masyarakat enggan menabung karena bunga relatif rendah.
4) Inflasi Tidak Terkendali, merupakan tingkatan yang paling parah yaitu di atas 100 %. Inflasi ini menimbulkan kehancuran ekonomi suatu Negara. Nilai uang mengalami penurunan secara dratis sehingga masyarakat tidak lagi percaya terhadap uang dan lebih memilih sistem barter.

5. Dampak Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara. Inflasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif dapat dijelaskan sebagai berikut:[57]

1) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tetap dan Tidak Tetap

Bagi masyarakat berpenghasilan tetap, fenomena ini dapat mengurangi daya belinya. Dan kondisi sebaliknya dialami

[56] Ibid,. hal. 38.
[57] Ibid,. hal. 39.

masyarakat berpenghasilan tidak tetap, misalnya pedagang. Saat terjadi inflasi, kelompok masyarakat tersebut akan memperoleh keuntungan besar. Inflasi membuat harga jual mengalami kenaikan.

2) Bagi Penabung

Nilai riil uang yang menurun merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Dan untuk meminimalisir dampak negatif masyarakat biasanya menyimpan hartanya dalam bentuk emas, tanah, property, dan valuta asing.

3) Bagi Debitur dan Kreditur

Bagi debitur saat terjadi inflasi akan menguntungkan dan begitupun sebaliknya yang terjadi pada kreditur. Hal ini disebabkan pada saat pengembalian uang pinjaman, nilai riil uang menurun daripada saat meminjamkan uang.

4) Bagi Produsen

Kondisi ini akan direspons produsen dengan menaikkan harga jual. Di satu sisi, inflasi menyebabkan biaya produksi bertambah. Dan di sisi lain, inflasi memungkinkan produsen memperoleh keuntungan lebih besar.

5) Bagi Perekonomian Nasional

Peristiwa ini akan meningkatkan suku bunga, menurunnya tingkat investasi, menurunya daya saing produk nasional, menyebabkan defisit neraca pembayaran, mendorong penanaman

modal bersifat spekulatif, serta menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa akan datang.

6. Kebijakan Mengatasi Inflasi

Inflasi dapat menguntungkan golongan masyarakat tertentu tetapi merugikan golongan lain, sehingga menimbulkan ketegangan sosial. Oleh sebab itu, tiap-tiap negara berusaha menghindari inflasi dengan menerapkan berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan untuk mengatasi inflasi antara lain sebagai berikut:[58]

1) Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral yang ingin mengurangi jumlah uang dengan cara mengendalikan pemberian kredit oleh bank umum kepada masyarakat. Alat kebijakan moneter dalam menanggulangi inflasi diantaranya adalah: (a) Kebijakan diskonto, adalah kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya di bank dari pada menjalankan investasi; (b) Operasi pasar terbuka yaitu kebijakan bank sentral juga menjalankan operasi pasar terbuka, yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan membeli surat-surat berharga

[58] Ibid,. hal. 39-40.

diharapkan uang bertambah di masyarakat; (c) Cadangan kas minimum ialah kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan prosentase pesediaan kas dari bank. Dengan dinaikkan prosentase persediaan kas, maka diharapkan jumlah kredit akan berkurang; (4) Kebijakan kredit selektif ialah kebijakan yang memperketat persyaratan kredit. Dengan ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

2) Kebijakan fiskal

Dengan kebijakan fiskal, pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jenis kebijakan fiskal diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Pengaturan pengeluaran pemerintah, yaitu pemerintah harus menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Kalau pembelanjaan negara melampaui batas yang telah ditentukan atau direncanakan akan mendorong pertambahan uang beredar;(b) Peningkatan tarif pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Dengan dinaikkannya tarif pajak, maka penghasilan rumah tangga akan diberikan kepada pemerintah, sehingga daya beli masyarakat atas barang dan jasa akan berkurang.

3) Kebijakan non moneter dan non fiskal

Kebijakan non moneter dan non fiskal dalam menanggulangi inflasi diantaranya meliputi: (a) Peningkatan produksi. Jika produksi

meningkat, walaupun jumlah uang bertambah, inflasi tidak terjadi. Bahkan hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perekonomian; (b) Kebijakan upah. Inflasi dapat diatasi dengan menurunkan pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) masyarakat. Penurunan *disposable income* dilakukan dengan menaikkan pajak penghasilan; (c) Pengawasan harga. Kecenderungan dinaikkannya harga oleh pengusaha dapat diatasi dengan penentapan harga maksimum oleh pemerintah. Namun, tindakan itu dapat menyebabkan timbulnya jual beli barang tanpa mengindahkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah (*black market*). Untuk mengatasi keadaan itu, pendistribusian barang-barang tersebut kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah; (d) melakukan pengaturan distribusi barang. Misalnya, melalui operasi pasar.

F. Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank Islam, selanjutnya disebut dengan bank syari'ah. Bank syari'ah dapat diartikan juga sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Antonio dan Perwataatmadja membedakan dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan syariat Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan tata cara

beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Dan adapun bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Bank syari'ah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syari'ah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.[59]

2. Prinsip Bank Syari'ah

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tantang Perbankan disebutkan bahwa bank syari'ah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syari'ah menganut prinsip-prinsip:

1) Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

[59] Khaerul Umam, "*Manajemen Perbankan Syari'ah*", (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hal. 15-16.

2) Prinsip kemitraan, bank syari'ah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama anatara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.
3) Prinsip ketentraman, produk-produk bank syari'ah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta.
4) Prinsip keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
5) Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *Rakhmatan lil alamin*.
6) Tidak ada riba dan laba wajar.

3. Fungsi dan Peran Bank Syari'ah

Bank Syari'ah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional. Fungsi dan peran bank syari'ah diantaranya tercantum dalam pembukaan standars akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:[60]

[60] Khaerul Umam, "*Manajemen Perbankan Syari'ah*……, hal. 19.

1) *Manajer Investasi*, bank syari'ah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2) *Investor*, sebagai investor bank syar'iah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
3) *Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran*, bank syari'ah dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4) Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada keuangan syari'ah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan sebagai berikut:

Mochammad Nugraha Reza Pradana,[61] dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap Non Performing Financing pada Bank Syari'ah". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas yang diproksikan dengan FDR, FAR, dan RR dan juga pengaruh variabel eksternal seperti inflasi dan nilai tukar terhadap NPF. Hasil dari penelitian ini yaitu FDR dan FAR memiliki

[61] Mochammad Nugraha Reza Pradana, "Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syari'ah", *Jurnal EKSIS* Vol. 13 No 2, 2018. Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 19.43.

pengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing,* RR, inflasi dan nilai tukar juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing.* Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y). Pada penelitian Nugraha variabel *independent* FDR (X_1), FAR (X_2), RR (X_3), inflasi (X_4), nilai tukar (X_5) dan variabel *dependent* (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syari'ah di Indonesia periode 2012 – 2015. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel *independent* FDR (X_1), GWM (X_2), nilai tukar (X_3), inflasi (X_4) dan variabel *dependent* (Y) yaitu risiko pembiayaan (*Non Performing Financing/*NPF). Studi kasus yang digunakan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2018.

Amalia Eka Purnamasari, Musdholifah,[62] dalam penelitiannya yang berjudul "Analisi Faktor Eksternal dan Faktor Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syari'ah di Indonesia Periode 2012-2015". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan produk domestik bruto, inflasi, nilai tukar, CAR, ROA, BOPO dan ukuran bank terhadap risiko pembiayaan (NPF). Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa secara simultan masing-masing faktor eksternal dan internal berpengaruh terhadap NPF. Tetapi secara parsial, menunjukkan bahwa faktor eksternal, yaitu pertumbuhan produk domestik bruto, inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NPF. Sementara dari internal bank menunjukkan CAR

[62] Amalia Eka Purnamasari, Musdholifah, "Analisi Faktor Eksternal dan Faktor Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syari'ah di Indonesia Periode 2012-2015", *BISMA – Bisnis dan Manajemen* Vol. 09 No 1, 2016. Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 19.43.

dan BOPO tidak memiliki pengaruh, sedangkan ROA memiliki pengaruh negatif dan ukuran bank memiliki pengaruh positif terhadap NPF. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan dalam variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y). Pada penelitian Amalia variabel *independent* PDB (X_1), inflasi (X_2), nilai tukar (X_3), CAR (X_4), ROA (X_5), ukuran bank (X_6) dan variabel *dependent* (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syari'ah di Indonesia periode 2012 – 2015. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel *independent* FDR (X_1), GWM (X_2), nilai tukar (X_3), inflasi (X_4) dan variabel *dependent* (Y) yaitu risiko pembiayaan (*Non Performing Financing/*NPF). Studi kasus yang digunakan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2018.

Mares Suci Ana Popita,[63] dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor eksternal yang terdiri dari GDP, Inflasi, SWBI dan penyebab internal yang terdiri dari variabel FDR, RR, Total Aset yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP riil dan FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF dan inflasi, SWBI, RR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF sedangkan Total Aset mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Adapun

[63] Mares Suci Ana Popita, "Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Acounting Analysis Journal* Vol. 2 No 4,2013. Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 21.43.

perbedaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan dalam variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y). Pada variabel *independent* GDP (X_1), inflasi (X_2), SWBI (X_3), FDR (X_4), RR (X_5), Total Aset (X_6), dan variabel *dependen* (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Studi kasus yang diangkat yaitu pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2008-2013. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel *independent* FDR (X_1), GWM (X_2), nilai tukar (X_3), inflasi (X_4) dan variabel *dependent* (Y) yaitu risiko pembiayaan (*Non Performing Financing/*NPF). Studi kasus yang digunakan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2018.

Yulya Aryani, Lukytawati Anggraeni, Ranti Wiliasih,[64] dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014". Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Bank *size*, biaya *overhead* dan SBIS rate memiliki efek negatif signifikan pada *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Net Income Margin* (NIM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan BI *rate* memiliki efek positif signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan dalam variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y). Pada variabel *independent* FDR (X_1), Bank *size* (X_2), CAR (X_3), KAP

[64] Yulya Aryani, dan Lukytawati Anggraeni, Ranti Wiliasih, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014", *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 4, No.1, 2016. Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 19.43.

(X_4), NIM (X_5), Biaya *Overhead* (X_6), BI *Rate* (X_7), SBSI *Rate* (X_8) dan variabel *dependen* (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Studi kasus yang diangkat yaitu pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel *independent* FDR (X_1), GWM (X_2), nilai tukar (X_3), inflasi (X_4) dan variabel *dependent* (Y) yaitu risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*/NPF). Studi kasus yang digunakan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2018.

Ana Nur Hidayah,[65] dengan judul "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya *Non Performing Financing* Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2011-2018". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh secara parsial dan simultan dari FDR, CAR, Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian ini dinyatakan bahwa (1) Secara parsial *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF); (2) Secara parsial *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF); (3) Secara simultan atau bersama-sama variabel *Financing to Deposite Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF); (4) Secara simultan atau bersama-sama variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

[65] Ana Nur Hidayah, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Terjadinya *Non Performing Financing* Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2011-2018", (Tulungagung : Skripsi tidak dipublikasikan, 2019). Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 22.24.

pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) periode 2011-2018. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y). Pada skripsi Ana variabel *independent* FDR (X_1), CAR (X_2), inflasi (X_3), dan variabel *dependent* (Y) yaitu risiko pembiayaan (*Non Performing Financing/NPF)*. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Negara Indonesia Syari'ah di Indonesia periode 2011 – 2018. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel *independent* FDR (X_1), GWM (X_2), nilai tukar (X_3), inflasi (X_4) dan variabel *dependent* (Y) yaitu risiko pembiayaan (*Non Performing Financing/*NPF). Studi kasus yang digunakan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2018.

Aminatu Sholihah,[66] yang berjudul "Pengaruh Kurs, Inflasi dan *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap Rasio *Non Performing Financing* (NPF) PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2015". Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh signifikan kurs, inflasi dan GDP terhadap rasio *Non Performing Financing* PT. Bank Syari'ah Mandiri baik secara parsial (individu) dan simultan (bersama-sama). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio *Non Performing Financing* PT. Bank Syariah Mandiri. inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio *Non Performing Financing* PT. Bank Syariah Mandiri, dan GDP berpengaruh negatif dan

[66] Aminatu Sholihah, "Pengaruh Kurs, Inflasi dan *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap Rasio *Non Performing Financing* (NPF) PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2015", (Tulungagung : Skripsi tidak dipublikasikan, 2016). Diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 22.46.

signifikan terhadap rasio *Non Performing Financing* PT. Bank Syariah Mandiri. Sedangakan secara simultan atau bersama-sama antara kurs, inflasi dan GDP berpengaruh signifikan terhadap rasio *Non Performing Financing* PT. Bank Syariah Mandiri. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y). Pada skripsi Aminatu variabel *independent* kurs (X_1), inflasi (X_2), GDP (X_3), dan variabel *dependent* (Y) yaitu risiko pembiayaan (*Non Performing Financing/NPF)*. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Syari'ah Mandiri periode 2008 – 2015. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel *independent* FDR (X_1), GWM (X_2), nilai tukar (X_3), inflasi (X_4) dan variabel *dependent* (Y) yaitu risiko pembiayaan (*Non Performing Financing/*NPF). Studi kasus yang digunakan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2018.

Umi Uswatun Hasanah,[67] dengan judul "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap *Non Performing Financing* (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Indonesia Periode 2013-2015)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan dari inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil dalam skripsi ini menunjukkan bahwa variabel inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Variabel Suku Bunga berpengaruh secara signifikan terhadap *Non*

[67] Umi Uswatun Hasanah, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap *Non Performing Financing* (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Indonesia Periode 2013-2015", (Surakarta : Skripsi dipublikasikan, 2017)

Performing Financing. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y). Pada skripsi Umi variabel *independent* Inflasi (X_1), Suku Bunga (X_2), Nilai Tukar (X_3) dan variabel *dependent* (Y) yaitu (*Non Performing Financing/NPF)*. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Indonesia periode 2013-2015. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel *independent* FDR (X_1), GWM (X_2), nilai tukar (X_3), inflasi (X_4) dan variabel *dependent* (Y) yaitu risiko pembiayaan (*Non Performing Financing/*NPF). Studi kasus yang digunakan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2018.

Tri Handoyo Seno,[68] dengan judul "Analisis Pengaruh Giro Wajib Minimum *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap *Non Performing Financing* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia periode 2009-2016". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Giro Wajib Minimum *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap *Non Performing Financing* Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian ini dinyatakan bahwa variabel Giro Wajib Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap *Non Performing Financing*, variabel *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap *Non Performing Financing*, sedangkan secara simultan,

[68] Tri Handoyo Seno, "Analisis Pengaruh Giro Wajib Minimum *Financing Deposit to Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap *Non Performing Financing* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia periode 2009-2016", (Tulungagung : Skripsi tidak dipublikasikan, 2017). Diakses pada tanggal 05 September 2019 pukul 22.24.

menunjukkan bahwa Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap *Non Performing Financing* Bank Muamalat Indonesia. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y). Pada skripsi Handoyo variabel *independent* yaitu Giro Wajib Minimum (X_1) *Financing to Deposit Ratio* (X_2) dan *Capital Adequacy Ratio* (X_3) dan variabel *dependent* (Y) yaitu *Non Performing Financing* (NPF). Periode yang digunakan Tahun 2011 – 2015. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel *independent* FDR (X_1), GWM (X_2), nilai tukar (X_3), inflasi (X_4) dan variabel *dependent* (Y) yaitu risiko pembiayaan (*Non Performing Financing/*NPF). Periode yang digunakan 2015 – 2018.

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi gambaran pola hubungan antar variabel yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.[69] Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Kerangka konseptual berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada

[69] Muhamad, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*", (Jakarta : Raja Grafido Persada, 2013), hal. 256.

pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka konseptual sebagai berikut :

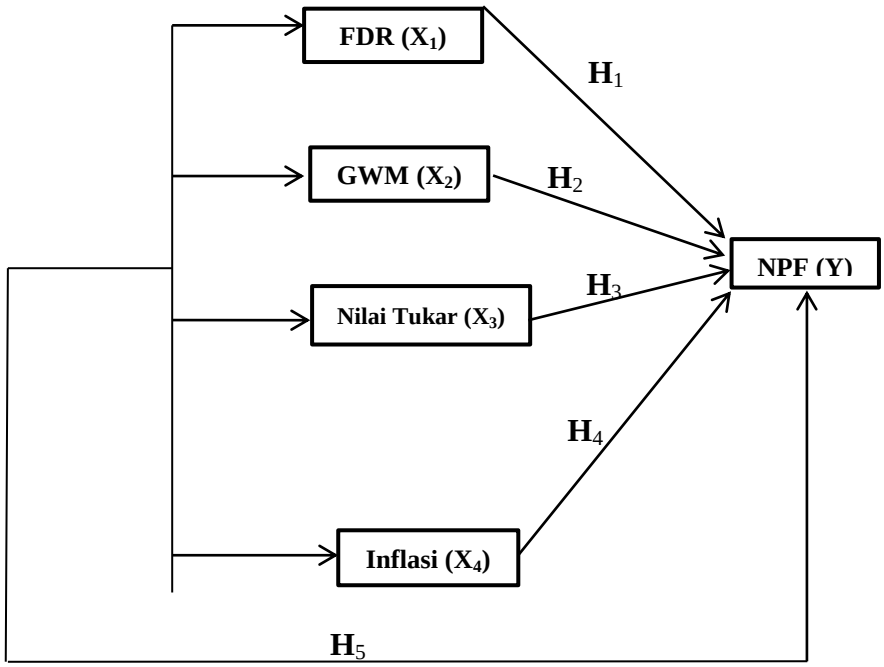

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Variabel bebas (X) dari FDR (X_1), GWM (X_2), Nilai Tukar (X_3) dan Inflasi (X_4), sedangkan variabel terikat adalah NPF (Y) pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Keterangan:

1. H_1 : Pada hipotesis 1 menjelaskan mengenai pengaruh variabel FDR (X_1) terhadap NPF (Y).
2. H_2 : Pada hipotesis 2 menjelaskan mengenai pengaruh variabel GWM (X_2) terhadap NPF (Y).
3. H_3 : Pada hipotesis 3 menjelaskan mengenai pengaruh variabel Nilai Tukar (X_3) terhadap NPF (Y).

4. H_4 : Pada hipotesis 4 menjelaskan mengenai pengaruh variabel inflasi (X_4) berpengaruh terhadap NPF (Y).
5. H_5 : Pada hipotesis 5 menjelaskan secara bersama-sama yaitu FDR (X_1), GWM (X_2), Nilai Tukar (X_3) dan Inflasi (X_4) berpengaruh terhadap NPF (Y).

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.[70] Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_1 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF).

H_2 : Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF).

[70] Sugiyono, *"Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*", (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 9.

H_3 : Nilai Tukar berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

H_4 : Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

H_5 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), Nilai Tukar dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).